



Judul : Heboh "Apartemen Mewah" di belakang Lapas Cibinong, Menteri Imipas & Kalapas akan disidang DPR
Tanggal : Jumat, 25 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 6

Heboh "Apartemen Mewah" Di Belakang Lapas Cibinong **Menteri Imipas & Kalapas Akan Disidang DPR**

HEBOH adanya fasilitas mirip "apartemen mewah" yang ditemukan Ombudsman di belakang Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berbuntut panjang. DPR bakal "menyidang" Menteri Imigrasi dan Pemasysarakatan (Imipas) serta Kepala Lapas (Kalapas) Cibinong di Senayan.

Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar dengan fasilitas yang disebut menyerupai apartemen saat inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026). Kamar-kamar tersebut berada di kawasan be-



VERSI DIGITAL
ARTIKEL INI.
SILAKAN
SCAN
QR CODE

lakang lapas, terpisah dari blok hunian warga binaan.

Fasilitasnya cukup lengkap, mulai dari ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas hingga perlengkapan memasak.

◆ BERSAMBUNG KE HAL 6

Menteri Imipias & Kalapas Akan Disidang DPR

... DARI HALAMAN 1

Di kawasan tersebut juga ditemukan fasilitas gym, kolam dan simulator golf yang masih dalam pembangunan.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menyebut, fasilitas itu layak hunian pribadi. Tim juga menemukan sekitar enam hingga tujuh orang yang diduga warga binaan berada di kawasan tersebut.

"Bagus sekali, standar apartemen. Artinya, walaupun kecil-kecil, kelengkapannya semua ada," kata Fikri dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Anggota Ombudsman lainnya, Syafrida R. Rasahan mengatakan, kawasan tersebut berada berdekatan dengan rumah dinas Kepala Lapas Cibinong. Di belakang area parkir, terdapat jalan menuju tempat pembuangan sampah yang tidak dipagar.

Menurut Syafrida, kondisi tersebut berpotensi menjadi akses keluar-masuk kendaraan dari kawasan yang diperiksa Ombudsman. "Ombudsman menemukan keamanan di Lapas Cibinong ini sangat longgar, dan kami melihat punya potensi untuk keluar-masuknya tahanan," ujar Syafrida.

Tak hanya fasilitas mewah, Ombudsman juga menemukan dugaan komersialisasi. Salah seorang penghuni disebut mengaku membayar untuk menempati fasilitas tersebut.

"Memang dia membayar sejumlah (uang), tapi tidak disebutkan angkanya, dan itu memang dikomersialkan," katanya.

Atas temuan tersebut, Ombudsman meminta Kementerian Imipias melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap regulasi, petugas, Kalapas dan pejabat terkait. Ombudsman juga meminta fasilitas yang dinilai tidak semestinya itu dibongkar dan warga binaan yang diduga menempatinnya dikembalikan ke blok hunian.

"Kemudian menindak petugas-petugas itu, melakukan evaluasi kepada petugas lapasnya termasuk Kalapas-nya, dan juga merobohkan bangunan yang ada yang tidak seharusnya ada di lapas," tandas Syafrida.

Temuan tersebut mendapat perhatian Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Dia mengaku, telah berkoordinasi dengan Menteri Imipias

Agus Andrianto.

Yusril juga mempersilakan media melihat langsung fasilitas yang menjadi temuan Ombudsman. Menurut Yusril, hal itu diperlukan untuk memastikan status bangunan dan siapa yang menggunakannya.

"Kalau ada, pastikan fasilitas apa itu, apakah itu rumah pegawai di dalam lapas atau tempat asimilasi napi menjelang bebas atau memang benar itu fasilitas mewah untuk para napi tertentu yang sanggup membayar," ujar Yusril, Kamis (24/9/2026).

Yusril menegaskan, jika terbukti ada pejabat atau pegawai Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas khusus, terlebih mengomersialkannya untuk warga binaan, sanksi akan dijatuhkan. "Jajaran Kementerian Imipias tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi," tegasnya.

Namun, jika hasil pemeriksaan menunjukkan temuan tersebut tidak sesuai fakta, Yusril meminta klarifikasi dilakukan secara terbuka.

"Jangan ada dusta di antara kita, tapi jangan pula ada fitnah di antara kita," tandas Yusril.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno membenarkan adanya bangunan yang ditemukan Ombudsman. Namun, dia membantah bangunan tersebut merupakan fasilitas khusus bagi narapidana.

Yudi menjelaskan, bangunan itu berada di kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Di dalam kawasan tersebut terdapat sejumlah rumah dinas jabatan.

"Rumah yang didatangi oleh Tim Ombudsman adalah rumah-rumah dinas jabatan yang memiliki SK Rumah Jabatan," kata Yudi dalam konferensi pers di Lapas Cibinong, Kamis (24/9/2026).

Meski begitu, Yudi memastikan, pihaknya tetap mendalami temuan Ombudsman. Jika ditemukan aktivitas yang tidak semestinya, penindakan akan dilakukan sesuai aturan.

Polemik ini juga direspons Senayan. Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya memastikan, pihaknya akan memanggil Menteri Imipias Agus Andrianto, Dirjen Pemasyarakatan Mashudi dan pihak Lapas Cibinong.

"Komisi XIII akan segera panggil pejabat terkait untuk tahu kejelasan masalah dan mencari langkah perbaikan segera yang diperlukan," ujar Willy, Kamis (24/9/2026). ■ BYU